



Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2024

Cecep Hermawan

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: cecep15001@gmail.com

Hasan Sidik

Departemen Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
Email: hasan.sidik@unpad.ac.id

| Dikirim: 10 April 2019 | Direvisi: 10 Mei 2019 | Diterima: 25 Mei 2019 | Dipublikasikan: 31 Mei 2019 |

Keywords

*diplomatic momentum,
Indonesia's national
action plan,
marine plastic debris,
maritime diplomacy*

ABSTRACT

The purpose of this article are explaining the National Action Plan against Marine Plastic Debris 2018-2025 as the diplomatic momentum for Indonesia to to succeed in its maritime diplomacy. Researchers used the theory of maritime diplomacy proposed by Christian le Miere. In analyzing existing maritime diplomacy, researchers used the momentum diplomatic theory from G.R. Berridge in researching diplomatic strategies used in transforming national policies into diplomatic strategies. In this study, researchers used qualitative research with discourse analysis as the technique for data analysis to analyze the establishment of existing momentum. From this study, it's found that the National Action Plan Against Marine Plastic Debtis is Indonesia's Diplomatic Momentum. Proven by the elevation of the issues, as well supported by Indonesia's leadership in ASEAN, East Asia Summit, and Our Ocean Conference, as well as the establishment of Indonesia Oceans Multi-Donor Trust Fund showing the success of National Action Plan as Indonesia's Maritime Diplomacy Momentum.

Kata Kunci

diplomasi maritim,
momentum
diplomatik,
rencana aksi nasional
Indonesia,
sampah plastik di laut

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025 dapat menjadi sebuah momentum diplomatik bagi Indonesia dalam mewujudkan visi diplomasi maritimnya. Peneliti menggunakan teori Diplomasi Maritim yang dikemukakan Christian le Miere. Dalam menganalisis diplomasi maritim yang ada, peneliti menggunakan teori momentum diplomatik dari G.R. Berridge untuk menganalisis proses perubahan kebijakan nasional menjadi strategi diplomasi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data berupa analisis wacana untuk menganalisis pembentukan momentum yang ada. Artikel ini menemukan bahwa Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025 merupakan momentum diplomatik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan urgensi dari isu sampah plastik, dan didukung dengan posisi kepemimpinan Indonesia di tingkat ASEAN, *East Asia Summit* dan *Our Ocean Conference*, serta terbentuknya *Indonesia-Oceans Multi-Donor Trust Fund* menunjukkan keberhasilan penggunaan Rencana Aksi sebagai momentum diplomatik dari diplomasi maritim Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lima pilar utama dalam pelaksanaan implementasi narasi kebijakan Poros Maritim Global (PMG), yang *pertama* adalah negara Indonesia harus menyadari dan melihat bahwa dirinya sebagai identitas kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan bagaimana kita mengelola samudera. Yang *kedua* adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang *ketiga* adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang *keempat* adalah berdiplomasi dengan cara seperti mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan. Dan yang terakhir adalah Indonesia seharusnya berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim (Presiden RI, 2015).

Pada 2018, fokus kebijakan diplomasi maritim Indonesia berada pada tiga sektor utama, yakni (1) perlindungan ekosistem dan sumber daya hayati laut; (2) pengembangan infrastruktur laut untuk memperkuat navigasi maritim di Indonesia, dan (3) penanganan kejahatan di laut dan penguatan domain-domain keamanan di laut (Presiden RI, 2015). Salah satu isu penting saat ini adalah perlindungan ekosistem laut dengan fokus masalah utama adalah penanganan sampah plastik di laut (*plastic marine debris*).

Masalah sampah plastik di laut Indonesia, saat ini, menjadi fokus dunia internasional. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bank Dunia (*World Bank*) pada April 2018, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok dengan produksi sampah tak terorganisir sebanyak 3.22 juta ton/tahun dengan jumlah sampah yang terbangun langsung laut adalah sebanyak 0.48-1.29 juta metrik ton/tahunnya (World Bank, 2017). Sampah laut yang berasal dari Indonesia dan

Tiongkok ini, tidak hanya memberikan masalah terhadap ekosistem laut Indonesia, namun juga terhadap ekosistem laut dari negara-negara yang ada di Asia Timur maupun Selatan mengingat arus laut yang banyak mengakumulasi sampah di wilayah perairan Samudera Hindia dan Pasifik.

Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Sehingga pada 2017, Indonesia merumuskan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik di Laut 2018-2025 yang dikampanyekan Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman terutama di konferensi internasional yang membahas isu-isu lingkungan laut seperti halnya *Our Ocean Conference* di Malta, pada Oktober 2017, *UNEP Annual Meeting*, serta *Indian Ocean Rim Association* di mana Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan tahunan IORA di tahun 2017 lalu (Kemlu RI, 2017). Dalam pidato yang diberikan oleh H.E. Arief Havaz Oegroseno, Deputi 1 Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Maritim Indonesia (2014-2018) di Malta, fokus utama Indonesia saat ini adalah penguatan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam penanganan sampah di laut internasional sebagai negara kedua terbesar yang menghasilkan sampah di laut setelah Tiongkok. Dengan mengalokasikan dana sebesar USD 1 milyar pertahun untuk membiayai proyek pengurangan sampah plastik global yang berasal dari Indonesia (Langenheim, 2017). Di kesempatan lain, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berbicara mengenai langkah-langkah implementasi dari visi poros maritim global sebagai salah satu cara bagi Indonesia dalam menjadi *norms entrepreneur* dalam bidang pemberantasan polusi laut, baik dari lingkup regional maupun global.

Pada level nasional, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut merupakan komitmen nasional Indonesia yang merupakan bagian dari Diplomasi Maritim Indonesia yang dikodifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 235

UNCLOS 1982, yang menyatakan negara-negara bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban internasional mereka terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pada level regional, isu maritim mulai sudah sering dibicarakan mengingat eskalasi politik kawasan di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Namun, berbeda dengan *Agreement on Transboundary Haze Pollutions*, masalah penanganan sampah plastik di laut sendiri masih belum mendapat perhatian yang signifikan dari level pertemuan tingkat tinggi (*ASEAN Summit*) sehingga penanganan sampah plastik di wilayah ASEAN, saat ini, lebih banyak diselenggarakan oleh mitra ASEAN, seperti halnya Amerika Serikat yang melaksanakan ekspedisi sampah plastik di laut ASEAN melalui yayasan USAID, serta program-program Kerajaan Denmark dan Kerajaan Norwegia yang bekerjasama dengan Bank Dunia dalam melakukan survei mengenai sampah plastik di laut Asia Tenggara (Perrson, 2018).

Berdasarkan paparan di atas, penulis mengambil suatu rumusan masalah, yaitu “Bagaimana momentum diplomasi maritim Indonesia melalui “Rencana Aksi Penanganan Sampah di Laut tahun 2018-2025” dalam kerangka *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)?”

KERANGKA KONSEPTUAL

Momentum Diplomatik

Momentum diplomatik merupakan sebuah momen di mana sebuah negara setuju untuk ikut serta atau tidak ikut dalam sebuah kegiatan diplomatik, atau saat sebuah negara menunjukkan sebuah kebijakan luar negeri atas jawabannya dalam keikutsertaan atau ketidakikutsertaannya pada sebuah kegiatan diplomatik di level internasional yang dapat berupa perjanjian internasional (umumnya) atau komitmen internasional lainnya (Berridge, 2010:55-6). Momentum diplomatik, secara praktik, dapat didefinisikan sebagai tindakan dan/atau kebijakan nasional dari

sebuah negara yang ditujukan kepada luar negeri.

Dalam menjelaskan sebuah momentum sendiri, harus dipahami bahwa sebuah momentum merupakan sebuah fenomena yang singkat dan sulit untuk dipertahankan. Dikarenakan posisi dari momentum itu sendiri yang merupakan bagian dari sebuah kejadian diplomatik yang lebih besar. Momentum diplomatik dapat merupakan bagian dari setujunya sebuah negara atas sebuah perjanjian dan konvensi internasional atau sebaliknya. Namun seringkali sebuah negara gagal mempertahankan momentum yang mereka miliki dan menjadikan keuntungan yang seharusnya mereka miliki, tidak dapat mereka pertahankan di waktu yang lama. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan sebuah momentum itu hilang dari sebuah negara, yaitu: (1) saat pejabat negara yang ikut serta atau yang bertanggungjawab akan momentum diplomatik dalam sebuah perjanjian internasional atau dalam kebijakan luar negeri mengundurkan diri dari proses tersebut, sehingga adanya penghentian sementara dari komitmen sebuah negara dalam hal tersebut; (2) negara merasa bahwa sebuah perjanjian internasional dirasa tidak lagi menguntungkan bagi negaranya, atau di saat kebijakan luar negeri mereka dirasa tidak lagi merepresentasikan kepentingan nasional. Seperti yang sering kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya dalam menentukan fokus kebijakan luar negeri Indonesia; (3) kompleksitas efek dari momentum tersebut yang dirasa akan memberikan terlalu banyak risiko bagi kepentingan nasional (Berridge, 2010:56-7).

Namun, dalam memahami momentum diplomatik, harus dipahami bahwa beberapa negara memutuskan untuk tidak ikut serta dalam perjanjian internasional dan memutuskan untuk memulai momentumnya sendiri atas beberapa alasan. *Pertama* adalah untuk meminimalisasi adanya kebuntuan dari negosiasi dikarenakan berbenturan dengan kepentingan nasional. *Kedua* adalah untuk

mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah perjanjian internasional. *Ketiga*, karena negara ingin membangun pencapaian-pencapaian yang signifikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam sistem internasional yang ada. Sehingga, sebuah negara yang mungkin dipersalahkan dalam sebuah perjanjian internasional, dapat memberikan bukti komitmen sebagai reparasi atas kesalahannya. Ketiga alasan ini dianggap akan menunjukkan nilai diplomatik yang lebih baik dan mungkin akan berujung pada komitmen internasional yang bersifat legal, yakni penandatanganan dan ratifikasi atas sebuah konvensi/ perjanjian internasional (Berridge, 2010:58-9). Dalam teori momentum diplomatik, terdapat empat komponen utama yang menentukan bagaimana sebuah momentum diplomatik dapat dipertahankan, yakni: (1) tenggat waktu; (2) metafora pergerakan; (3) publisitas, dan (4) eskalasi tingkat pembicaraan.

METODE RISET

Artikel ini merupakan luaran riset skripsi yang mempergunakan metode kualitatif. Objek kaji artikel ini adalah Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2014. Kegiatan ini dalam pandangan penulis menjadi momentum diplomasi maritim bagi pemerintah Indonesia. Penulis mengumpulkan data primer maupun sekunder dengan cara studi literatur, wawancara dan juga observasi.

MOMENTUM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA

Tenggat Waktu Momentum Diplomasi Indonesia

Dalam melihat tenggat waktu artifisial, maka yang dimaksud adalah signifikansi dari sebuah tenggat waktu secara internal, dan dampaknya terhadap implementasi dan penguatan momentum diplomatik dari dalam negeri. Sehingga, tidak akan berbicara mengenai bagaimana dampak diplomatik dari tenggat waktu ini. Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut memiliki tenggat

waktu legal yang tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 yakni dari tahun 2018-2025 dengan target pengurangan 30% sampah plastik secara keseluruhan, dan 70% target pengurangan sampah plastik di laut. Target ini sendiri menunjukkan tiga hal yang signifikan dalam implementasi kebijakan dalam basis formal. Ketiga hal tersebut adalah sebagai panduan, citra yang dilihat negara lain, dan bahasa diplomatik.

Pertama, berkaitan dengan penggunaan batas waktu sebagai cara pemerintah untuk tetap berada pada tujuan utamanya untuk menangani sampah plastik di laut dengan lebih fokus. Pemerintah Indonesia, dalam naskah Rencana Aksi Nasional sendiri menggunakan perincian program tahunan yang bersifat terperinci, dengan memberikan targetan tahunan kepada setiap kementerian/ lembaga negara dalam memenuhi targetnya. Maka, dengan demikian, dalam hal momentum diplomatik, tenggat waktu dalam Rencana Aksi Nasional, dapat dikatakan sebagai panduan pergerakan dari praktik Rencana Aksi Nasional.

Kedua, berkaitan dengan cara negara lain memandang target ini sebagai sebuah target ambisius dari sebuah negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik di laut secara global. Saat ini Indonesia sudah mendapatkan berbagai pujian, baik oleh media, maupun dalam berbagai meja negosiasi, mulai dari tingkat SOM hingga pertemuan kepala negara. Hal ini dikarenakan target dan tenggat waktu yang diusung yang cenderung ambisius, sehingga memberikan Indonesia sebuah citra baru di dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan tiga hal: (1) pujian dari negara-negara yang hadir dalam *Our Ocean Conference 2018*; (2) berjalannya kelompok kerja atas masalah sampah plastik di tingkat ASEAN, dan; (3) munculnya deklarasi pemimpin EAS terhadap masalah sampah plastik.

Serta *ketiga*, berkaitan dengan bahasa diplomatik yang menunjukkan komitmen dari sebuah negara untuk memperkuat narasi keseriusan Indonesia dalam penanganan sampah plastik di laut. Hal ini sendiri tidak

terlalu mencolok, namun sangat kentara jika pidato para pejabat tinggi negara saat membahas sampah plastik di perbandingkan satu sama lain. Ada dua hal yang selalu disebut dalam beberapa pernyataan yang diberikan pemerintah Indonesia yang tertangkap dalam artikel ini, yakni: (1) Rencana Aksi Nasional dengan menekankan pada tenggat waktu 2025 dan target 70% pengurangan sampah plastik di laut, dan; (2) tiga produk Perpres mengenai sampah plastik di laut yang sudah diungkap pada bab sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan tenggat waktu sebagai bahasa diplomatik yang memperkuat narasi dari diplomasi maritim Indonesia.

Tenggat Waktu Praktik Diplomasi Maritim Indonesia

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut bukan hanya merupakan sekedar narasi kebijakan untuk memperkuat bagaimana Indonesia terlihat di depan negara-negara mitranya, namun juga menunjukkan adanya kolaborasi-kolaborasi yang menjadi sebuah cara dalam proses implementasi dari rencana aksi nasional. Ada empat hal utama yang mengindikasikan bahwa Rencana Aksi Nasional memiliki elemen-elemen yang dibutuhkan untuk disebut memiliki tenggat waktu praktikal. Yaitu, cepatnya proses perencanaan rencana aksi, munculnya negara donor sebelum program diluncurkan, kelahiran konsorsium pendanaan, dan faktor bentuk rencana aksi.

Pertama, adalah berkaitan dengan adanya perubahan yang signifikan dari proses perencanaan kebijakan yang berjalan dengan cepat, sejak tahun 2013-2017. Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut baru mulai direncanakan di tahun 2013 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sebuah gagasan semata, realisasi dari gagasan ini adalah saat pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Oktober 2018.

Dengan Deputi IV yang masih menjabat hingga saat ini menjadi motor utama penggerak dalam proses perencanaan. Proses perencanaan ini berlangsung cepat, dan rampung di tahun 2016, dan direncanakan untuk mulai dilakukan di tahun 2017. Secara praktik, rencana aksi ini telah mulai di inisiasi di tahun 2017, sekalipun secara legal baru mulai disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Plastik di Laut. Dengan proses perencanaan yang cepat, maka dapat terlihat bahwa tenggat waktu juga dapat dilihat secara praktikal.

Kedua, adalah berkaitan dengan adanya dukungan dari negara-negara donor dalam melakukan proses percepatan implementasi rencana aksi dengan adanya *Indonesia Marine Debris Hotspot Survey* yang diselenggarakan di akhir tahun 2017 dan di publikasikan pada April 2018. Dukungan dimulai saat pemerintah Denmark memberikan dana hibah sebesar USD11,8 juta terhadap pemerintah Indonesia di tahun 2017 dengan melakukan kolaborasi penanganan pengelolaan dana dengan Bank Dunia. Pembiayaan program dari Rencana Aksi Nasional awalnya sebesar USD1 milyar yang berasal dari APBN Negara selama tahun 2018-2025. Dengan adanya dana tambahan ini, otomatis, pemerintah Indonesia akan mampu menyelesaikan Rencana Aksi Nasional dengan lebih cepat. Program pertama yang diselenggarakan adalah *Indonesia Marine Debris Hotspot Survey* yang melajukan identifikasi terhadap titik-titik yang menjadi sumber sampah plastik di laut Indonesia. Rencana Aksi Nasional, yang awalnya merencanakan survei pada tahun 2019, akhirnya mampu untuk mempercepat proses ini, bahkan sebelum Rencana Aksi Nasional disahkan oleh Presiden.

Ketiga, kolaborasi Indonesia dalam *Problue Fund* dan *Indonesia Oceans Multi-Donor Trust Fund* di tahun 2018 dan di implementasikan mulai tahun 2019 yang memperkuat dorongan Indonesia dalam menyelesaikan rencana aksi sesuai pada

waktunya. Bank Dunia meluncurkan *Problue Fund* pada Oktober 2018 dengan Indonesia sebagai salah satu negara target strategis. Sementara itu, Indonesia juga memiliki *Indonesia Oceans Multi-Donor Trust Fund* yang saat ini didukung oleh Norwegia yang menyumbangkan dana USD35 juta pada *Problue Fund* dan *Indonesia-Oceans Multi-Donor Trust Fund*. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi maritim Indonesia, sekaligus faktor yang menunjukkan tenggat waktu praktikal dari rencana aksi, yakni adanya sebuah percepatan rencana aksi dengan berbagai donor yang dimiliki.

Serta yang *keempat*, faktor bentuk legal dari rencana aksi yang merupakan garis waktu pelaksanaan tahunan dari rencana aksi yang memberikan pemerintah Indonesia sebuah kepastian mengenai apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus bertanggung jawab, serta target apa yang perlu dicapai pada basis tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2025. Keempat hal ini menunjukkan satu hal yang sama, yakni adanya keberlanjutan dari Rencana Aksi Nasional, yang merupakan sebuah tanda baik bahwa momentum diplomatik yang Indonesia dapatkan melalui Rencana Aksi Nasional, dapat terus Indonesia pertahankan.

Metafora Kolaborasi dalam Rencana Aksi Nasional

Kolaborasi yang terjadi dalam Rencana Aksi Nasional saat ini merupakan metafora kolaborasi di mana pemerintah Indonesia berusaha untuk mencari mitra sebanyak mungkin dengan cara melibatkan Rencana Aksi Nasional dalam setiap perbincangan dan negosiasi di berbagai tingkat negosiasi, mulai dari konsolidasi kepala daerah hingga konsolidasi pemimpin negara-negara dunia dalam isu preservasi lingkungan laut. Ada empat hal yang menunjukkan adanya metafora kolaborasi dalam momentum diplomatik yang dicapai Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut ini.

Pertama, adanya dukungan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan implementasi yang masif di tingkat daerah yang memperkuat narasi metafora pergerakan dari Rencana Aksi Nasional. Hal ini ditunjukkan dari aksi pemerintah Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, Kota Bogor dan Kota Bandung, serta kota-kota lainnya yang akan segera menyusul. Dalam *public hearing* yang diselenggarakan oleh *Alliance Zero Waste Indonesia* yang menghadirkan Walikota Bogor, Wali Kota Balikpapan, dan juga Direktur Penanganan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, saat ini, kabupaten/ kota di Indonesia sedang dalam proses pengurangan sampah plastik untuk mendukung rencana aksi nasional. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan sendiri, maka diharapkan bahwa rencana aksi nasional dapat lebih cepat untuk diselesaikan.

Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dianggap penting dalam implementasi Rencana Aksi Nasional, karena berdasarkan statistik, 80% dari sampah plastik di laut merupakan sampah yang berasal dari darat. Kota Bogor telah menerapkan aturan larangan penggunaan kantong plastik pada perusahaan-perusahaan retail, dan himbuan pada produsen untuk mengurangi penggunaan plastik, atau mengganti bahan plastik yang digunakan. Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2018 menerapkan aturan yang sama, mengikuti Kota Banjarmasin yang sudah melakukan kebijakan serupa di tahun 2015. Pemerintah Indonesia, melalui KLHK menganggap kolaborasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas dari program rencana aksi, sehingga tidak hanya aktor nasional saja yang terlibat, namun juga aktor lokal. Pada *public hearing* yang sama, seorang anggota sekretariat Uni Eropa juga hadir yang mengatakan hal yang serupa mengenai masalah ini, bahwa kolaborasi di berbagai tingkatan penting dalam melancarkan sebuah rencana aksi nasional. Dengan demikian akan lebih banyak pula mitra yang akan ikut serta dalam implementasi rencana aksi. Hal ini memberikan sebuah simpulan, bahwa

kolaborasi yang kuat di dalam negeri, juga mampu memperkuat momentum diplomatik yang dimiliki oleh sebuah negara, karena pandangan dari negara yang menjadi target diplomasi maritim Indonesia juga akan menguat terhadap Indonesia, sehingga momentum diplomatik akan tetap dipegang oleh Indonesia.

Kedua, konsolidasi internasional dalam rangka pencarian negara donor yang relevan dengan tujuan dari Rencana Aksi Nasional. Ada tiga donor utama yang telah terlibat sejak proses perencanaan Rencana Aksi Nasional di tahun 2013, yaitu: Denmark, Norwegia, dan Bank Dunia dalam kerangka *Indonesia Oceans, Marine Debris and Ocean Resources Multi-Donor Trust Fund*. *Keempat*, konsolidasi di level regional melalui ASEAN dan EAS. Konsolidasi di level ASEAN dilakukan melalui pembentukan *Working Groups on Marine Plastic Debris*, sementara EAS saat ini memang sedang memfokuskan diri pada penanganan masalah sampah plastik di laut yang sudah semakin signifikan dampaknya.

Ketiga, konsolidasi di level global melalui *Ocean Global Leadership Forum (OGLF)* untuk pembicaraan dengan berbagai aktor negara, dan *Our Ocean Conference* untuk konsolidasi yang bersifat *multi-stakeholders*. Di dalam OGLF sendiri, yang dibicarakan adalah komitmen global, Indonesia merupakan negara yang menginisiasikan forum ini, dengan menggunakan momentum *Our Ocean Conference 2018* sebagai tempat yang efektif dalam mengumpulkan negara-negara yang hirau akan masalah kelautan. Dengan peranan dari OGLF sebagai penyatu komitmen di level pejabat tinggi, maka hadi pula *Our Ocean Conference* yang tidak hanya menghadirkan sektor publik, namun juga sektor privat, di mana Indonesia, sebagai negara tuan rumah di tahun 2018, mendorong lebih banyak diskusi dengan berbagai macam aktor, termasuk NGO dan juga sektor privat. Salah satu pertemuan *multi-stakeholder* tersebut adalah pertemuan antara pemerintah Indonesia, Bank Dunia,

pemerintah Tiongkok, pemerintah India, Danone Indonesia dan Unilever Indonesia yang hasilnya adalah mendorong kolaborasi antara sektor publik dan privat lintas batas negara dalam implementasi rencana aksi nasional Indonesia dan juga rencana-rencana penanganan sampah plastik lain yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki masalah sebagai penyumbang sampah plastik terbesar, ataupun penerima sampah plastik.

Publisitas Penyokong Rencana Aksi Nasional

Rencana Aksi Nasional pertama kali dipublikasikan oleh Duta Besar Arief Havaz Oegroseno yang sebelumnya menjabat sebagai Deputy 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh beliau dalam pidatonya di Malta, yaitu: (1) target Indonesia dalam mengurangi 70% sampah plastik di laut di tahun 2025; (2) Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia untuk melakukan koordinasi rencana aksi, menimbang ukuran dari rencana aksi nasional milik Indonesia, yang memang bertarget untuk menjaring mitra global sebanyak mungkin; (3) permintaan pemerintah Indonesia akan negara-negara yang mau untuk memberikan donor berupa dana hibah sebagai upaya melindungi laut, yang menurut UNCLOS merupakan kekayaan bersama; (4) mengundang negara-negara di dunia, yang peduli akan sampah plastik di laut untuk bergabung bersama Indonesia, membentuk *Alliance for Marine Plastic Solutions (AMPS)*. Aliansi ini sendiri akan menjadi sebuah sarana bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan koordinasi multi-level dalam penanganan sampah plastik di laut, mulai dari level pemerintah lokal, nasional, regional dan internasional dalam membentuk jaringan antara sektor publik, privat, dan individu serta organisasi swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk turut serta dalam preservasi lingkungan laut Indonesia dan global; (5) konsolidasi

global untuk negara-negara kepulauan untuk bergabung melindungi laut bersama.

Pernyataan Indonesia dalam OOC 2017 ini sontak mengundang banyak perhatian media internasional yang memberitakan komitmen Indonesia dalam penanganan sampah plastik di laut. Berbagai pemberitaan semakin memperbesar narasi yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam OOC 2017 Malta dalam usaha penanganan sampah plastik di laut. Media seperti halnya *The Guardian*, *Times*, *Straits Times*, *The Economist*, *The Diplomat*, dan beberapa media organisasi non-pemerintah seperti halnya *The Conversation*, *Greenpeace*, dan media organisasi internasional seperti halnya *World Economic Forum*, *UNEP*, dan *COP* menyatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan komitmen terbesar dalam OOC. Salah satu negara donor terbesar dalam OOC sekalipun, hanya mampu memberikan dana komitmen sebesar USD50 juta pertahun. Sementara Indonesia, dengan target ambisiusnya telah mampu untuk memberikan komitmen dalam penyelesaian sampah plastik di laut selama delapan tahun dengan dana sebesar USD 1 milyar. Sebuah komitmen yang juga dianggap berlebihan oleh beberapa media. Namun, semakin banyak media memberitakan komitmen yang dianggap 'berlebihan' ini, maka semakin masif pula publisitas yang dapat didapatkan oleh Indonesia, tanpa harus berulang kali menyuarakan komitmen agar didengar oleh negara donor dan negara mitra strategis. Dengan adanya publikasi yang terus-menerus ini, Indonesia bahkan telah mendapatkan negara donor, sekitar satu bulan setelah komitmen ini diumumkan, yakni pada tanggal 27 November 2017, pemerintah Denmark merupakan negara pertama yang menjadi negara donor Indonesia dalam penanganan sampah plastik di laut, yang dilanjutkan oleh Norwegia pada awal tahun 2018.

Yang menyebabkan mengapa pemberitaan media amat berpengaruh terhadap publisitas Rencana Aksi Nasional adalah beberapa pemberitaan yang menggunakan bahasa-bahasa yang berlebihan dalam

menggambarkan tindakan komitmen Indonesia. *Jakarta Globe* menggunakan pernyataan UNEPⁱ yang mengatakan bahwa laut hanya dapat mampu menampung sampah hingga tahun 2050 sebelum menjadi jenuh, dan mengatakan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah ini semudah menyelesaikan masalah IUUF. Sementara *World Economic Forum* menggunakan perbandingan dana yang diberikan oleh negara-negara yang memiliki produksi sampah setara dengan Indonesia, dan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling serius dalam penanganan sampah. Pernyataan ini, merupakan bahasa media yang membentuk narasi yang ada saat ini. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memimpin dalam penanganan sampah plastik di laut, sekalipun dalam praktik dalam negeri, masih terdapat banyak hambatan. Sekalipun demikian, Indonesia saat ini telah berhasil memanfaatkan publisitas yang didapatkan sejak tahun 2017 untuk mempertahankan momentum diplomatik Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional sebagai salah satu senjata diplomasi yang penting dalam diplomasi maritim Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara pernyataan pejabat tinggi negara dan pemberitaan media internasional yang masif, maka Rencana Aksi Nasional mendapatkan publikasi yang memberikan dampak diplomatis terhadap Indonesia, seperti halnya bergabungnya Norwegia dalam proyek penanganan sampah plastik di laut Indonesia bersama Denmark dan Bank Dunia di awal tahun 2018.

Eskalasi Tingkat Pembicaraan Internal

Peranan dari aktor internal dalam peningkatan tingkat pembicaraan dari Rencana Aksi Nasional untuk tidak hanya menjadi sekedar wacana nasional di prakarsai oleh dua kementerian utama, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Luar Negeri yang sama-sama sudah bekerja keras dalam implementasi awal dari rencana aksi nasional, yakni dalam implementasi dari strategi-strategi pengelolaan

sampah lintas batas negara. Sebenarnya aktor internal yang juga ikut serta dalam Rencana Aksi Nasional bukan hanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Luar Negeri, namun dengan mempertimbangkan peranan dalam peningkatan eskalasi pembicaraan maka kedua kementerian inilah yang paling signifikan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai sumber dari segala substansi dalam segala proses negosiasi, dan Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan diplomasi, karena sekalipun negosiasi yang lebih dalam akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, namun pembuka jalur diplomasi akan selalu dipegang oleh Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan data yang dihimpun, *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman* dalam usaha mempertahankan momentum diplomatik di dalam perencanaan hingga implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut memiliki tiga fungsi utama. *Pertama* adalah fungsi koordinasi. Di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional, administrasi hukum dan juga administrasi lainnya akan di koordinasikan melalui Kementerian Koordinator, sehingga tidak terpecah-pecah di masing-masing kementerian/ lembaga negara. Pemusatan koordinasi ini dibuat untuk mempermudah proses penanganan administrasi dari segala kegiatan yang ada, dikarenakan, belajar dari Kasus Montara, menyatukan urusan praktik dan administrasi di satu lembaga akan menyebabkan molornya eksekusi dari masing-masing program. *Kedua* adalah fungsi konsultatif. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman saat ini memegang peranan penting dalam perumusan berbagai kebijakan dan diplomasi yang berkaitan dengan pendayagunaan ruang laut. Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2017 dan Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia yang akan terbit di tahun 2019 merupakan produk dari

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sehingga saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki fungsi yang lebih dari sekedar koordinasi, namun juga konsultasi kebijakan dan arahan program nasional. *Ketiga* adalah fungsi praktis. Maksudnya adalah fungsi Kementerian Koordinator yang juga dapat ikut serta dalam implementasi dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian kasus Montara yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator dan juga Rencana Aksi Nasional yang penyelenggaraannya berpusat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Bahkan, fungsi negosiasi sekalipun saat ini dipegang oleh Kementerian Koordinator secara parsial.

Kementerian Luar Negeri sendiri memiliki dua peranan utama, yakni peranan negosiasi dan konsultasi. *Pertama*, berkaitan dengan negosiasi, pada dasarnya hanya kementerian luar negerilah yang memiliki kapasitas sebagai pembuka gerbang pertama dari setiap negosiasi. Surat yang ditujukan kepada pemerintah asing hanya dapat di keluarkan oleh Kementerian Luar Negeri atau atas sepengetahuan Kementerian Luar Negeri. Dalam Rencana Aksi Nasional sendiri Kementerian Luar Negeri memegang satu program yang paling penting dalam diplomasi maritim melalui Rencana Aksi Nasional, yakni mencari mitra strategis dan juga melakukan negosiasi di kala terjadinya sengketa berkaitan dengan isu polusi laut. Fungsi *kedua*, sama halnya seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di dalam Rencana Aksi Nasional, Kementerian Luar Negeri memegang peranan konsultatif dari Rencana Aksi Nasional, terutama saat ada permasalahan yang bersifat lintas batas negara. Seperti halnya masalah sampah plastik di laut yang membutuhkan berbagai aktor lintas batas negara dalam penyelesaian masalahnya. Hal ini terlihat pada setiap pertemuan internasional yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maupun oleh

kementerian/ lembaga negara lainnya berkaitan dengan sampah plastik yang selalu dihadiri oleh wakil dari Kementerian Luar Negeri. Maka dari itu, kedua aktor internal ini memegang peranan penting dalam proses peningkatan level pembicaraan dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025.

Kolaborasi dengan Aktor Eksternal

Di tahun 2017, setelah rencana aksi nasional berada di tahun keempat dalam masa perencanaannya, Indonesia berhasil mendapatkan kolaborator pertama yang signifikan, yakni negara donor pertama, dan dibentuknya konsorsium pendanaan pertama yang diprakarsai oleh Bank Dunia, yaitu *Indonesia Ocean, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor Trust Fund* yang ditandatangani oleh *Country Director* Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chavez pada 27 November 2017, dan di tanda tangani oleh pemerintah Denmark, melalui *Danish International Cooperation Agency* yang diwakili oleh Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, yaitu Rasmus Abigard Kristensen pada 28 November 2018. Selain Denmark, Norwegia juga ikut bergabung menjadi negara donor dalam *Trust Fund* ini, dengan kontribusinya sebesar USD1,4 juta terhadap *Indonesia-Oceans Multi Donor Trust Fund* di awal tahun 2018. Indonesia dan Norwegia memang sudah memiliki hubungan bilateral yang baik, terutama dalam hal lingkungan dan juga energi, sebagaimana hubungan Indonesia dan Denmark.

Trust Fund ini memiliki tujuan untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan memperkuat koordinasi untuk proses pembentukan strategi dan perencanaan yang matang dan berkelanjutan dalam melakukan manajemen atas kebijakan-kebijakan Indonesia atas perlindungan wilayah laut, pengurangan sampah di laut, dan penguatan sumber daya pantai dan laut. Selain itu, *Trust Fund* ini melakukan pembiayaan terhadap segala program yang dirasa pantas dan sesuai dengan tujuan dari pembentukan

Trust Fund ini sendiri, seperti halnya: pembentukan *Archipelago and Islands States Forum* (AIS) pada 1 November 2018, pendanaan *Our Ocean Conference* pada 27-31 Oktober 2018, proses survei titik-titik sampah plastik di laut Indonesia sepanjang akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018, hingga pembiayaan inisiasi kelompok kerja di tingkat ASEAN yang dilakukan oleh Indonesia, Thailand dan Vietnam pada 8 November 2018 di Singapura. Sehingga dengan demikian, pemerintah Indonesia telah mendapatkan faktor eksternal yang kuat dan berhasil membentuk sebuah momentum yang membuat negara-negara yang menjadi target untuk menjadi mitra strategis mampu merasa lebih percaya dan mau turut serta dalam segala bentuk program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia, tidak hanya memiliki Rencana Aksi Nasional yang menjadi momentum diplomatik, namun dengan suksesnya Rencana Aksi Nasional dalam menjaring negara mitra dan negara donor, saat ini program-program Indonesia yang berkaitan dengan kelautan juga mengalami peningkatan level pembicaraan, seperti halnya AIS lebih rutin dalam melakukan pembicaraan mengenai hak-hak dari negara pulau dan kepulauan, ataupun dukungan Indonesia dalam pencalonan IMO di tahun 2017 laluⁱⁱ.

Pembebanan tugas dalam penggunaan dana dari konsorsium pembiayaan ini berpusat pada dua aktor utama, yakni Bank Dunia dan pemerintah Indonesia. Bagi Bank Dunia, tugas-tugas yang diemban adalah: (1) mendukung agenda kebijakan laut Indonesia, termasuk mendukung proses strategi, perencanaan, pembentukan kapasitas dan dialog antar pemangku kepentingan; (2) mendukung upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di laut, seperti dalam melakukan analisis terhadap kondisi terkini, strategi, komunikasi dan dialog kebijakan, dan juga pengujian terhadap pendekatan-pendekatan yang paling relevan dalam menangani masalah sampah di laut; (3) meningkatkan ketahanan dari sumber

daya laut dan pantai, termasuk menganalisis kondisi terdini, dan pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan koordinasi strategi, kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan ketahanan kelautan; (4) melakukan fungsi manajemen dan administrasi terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *Trust Fund*, mendukung berbagai program berkaitan dengan tata kelola hubungan dengan mitra-mitra *Trust Fund*, perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana kerja dan keuangan, manajemen komunikasi, dan mengadakan diseminasi setiap hasil yang didapat, melakukan pelaporan terhadap progres yang didapatkan dan melakukan tindakan monitor dan evaluasi terhadap setiap program, serta (5) melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh penerima dana. Dengan demikian, Bank Dunia, seolah menjadi pengawas dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam program-program yang didanai oleh dana yang diberikan oleh negara-negara donor melalui *Trust Fund* ini. Sehingga bentuk kolaborasi yang ada saat ini, bukan lagi bersifat kemitraan semata, namun sudah bersifat manajemen hierarkis.

Sementara bagi pemerintah Indonesia, tugas yang diemban adalah melaksanakan setiap program dengan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dalam kerangka *Trust Fund* ini, serta mendukung segala bentuk komunikasi, dan diseminasi pengetahuan berkaitan dengan prioritas strategis, perencanaan dan hasil-hasil dari segala bentuk analisis dan pertemuan, dan untuk meningkatkan kesadaran dari berbagai pihak berkaitan dengan agenda-agenda laut yang menjadi kunci dari kebijakan laut Indonesia. Sehingga, *Trust Fund* sendiri memegang peranan penting dalam peningkatan level pembicaraan dari Rencana Aksi Nasional milik Indonesia, karena dengan adanya *Trust Fund*, maka Indonesia juga mendapatkan berbagai keuntungan diplomatik, seperti halnya kepercayaan dari negara-negara di

kawasan seperti yang akan dijelaskan pada dua bagian berikutnya. Bagian ini semakin memperkuat bagaimana Rencana Aksi Nasional mampu menjadi momentum diplomatik yang penting bagi Indonesia.

Selain itu, dalam pertemuan EAS tahun 2017, salah satu tema utama adalah bagaimana EAS mampu untuk membuat sebuah deklarasi komitmen yang ditandatangani oleh para pemimpin negara dalam melakukan penyelesaian masalah mengenai sampah plastik di laut. Tuntutan utamanya adalah kepada lima negara penyumbang sampah terbesar di dunia, yang kelimanya adalah anggota dari EAS dapat memberikan sebuah respons konkret terhadap isu yang ada. Selama masa sidang di tahun 2017, ada berbagai lembaga negara yang ikut memaparkan kondisi yang ada di negara masing-masing. Namun, dari lima negara yang diharapkan memberikan respons terhadap masalah sampah plastik, hanya Indonesia, Vietnam dan Filipina yang memberikan pemaparan di dalam pertemuan EAS yang dilakukan pada bulan September 2017 di Bali.

Pemerintah Vietnam yang diwakili oleh *Vietnam Administration of Seas and Islands* (VASI) memaparkan bagaimana saat ini Vietnam telah sadar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Vietnam, sebagai negara dengan 3260 km garis pantai, masalah sampah plastik di laut, adalah masalah terbesar Vietnam di bidang kelautan. Vietnam mengklaim sekalipun negaranya tidak melakukan ratifikasi terhadap rezim-rezim berkaitan sampah plastik di laut, pemerintahnya telah membuat berbagai aturan, termasuk *Law of Environmental Protection* dan *Law of Environmental Protection Tax* untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan di laut Vietnam. Bahkan kolaborasi eksternal pun telah dilakukan oleh Vietnam.

Hal ini direspons Indonesia dengan memaparkan hal serupa, dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah tinggal diam dalam hal penyelesaian masalah sampah plastik di laut, dengan komitmen yang dibuat

Presiden Joko Widodo pada pertemuan G20 di tahun 2017, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa Indonesia mampu meningkatkan capaian yang ada dengan tetap berpacu pada target pengurangan 70% sampah plastik di laut di tahun 2025.

Filipina yang pada pertemuan EAS tahun 2017 diwakili oleh *National Solid Waste Commission* memaparkan bagaimana Filipina telah berusaha untuk membentuk regulasi mengenai penanganan sampah plastik di laut, karena menyadari bahwa Filipina juga ikut serta menjadi negara lima besar penyumbang sampah plastik di laut. Hal ini memberikan simpulan pada anggota pemerintahan yang hadir, baik dari Indonesia, Filipina dan Vietnam maupun dari negara-negara anggota EAS lainnya, bahwa dibutuhkan sebuah deklarasi aksi dari EAS yang bukan hanya setingkat *senior officials*, namun setingkat kepala negara dalam proses penanganan sampah plastik di laut. Indonesia sebagai negara yang sedang mencanangkan Rencana Aksi Nasional menganggap bahwa kolaborasi dengan EAS adalah salah satu cara meraih momentum diplomatik yang juga dapat meningkatkan jumlah negara mitra strategis dan juga negara donor yang ikut serta pada *Indonesia Oceans Multi-Donor Trust Fund*.

Di tahun 2018, pada sidang EAS ke-13 pada 15 November 2018, akhirnya EAS menyepakati *East Asia Summit Leaders' Statement on Combating Marine Plastic Debris* yang ditandatangani oleh kepala pemerintahan dan kepala negara dari anggota dari EAS, yaitu negara anggota ASEAN, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Republik Korea, Selandia Baru, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Deklarasi pemimpin EAS ini memiliki lima poin utama yang berkorespondensi dengan kepentingan Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional, kelima poin itu adalah: (1) meningkatkan promosi manajemen lingkungan dari sampah plastik dengan mengedepankan efisiensi sumber daya, ekonomi sirkuler, manajemen berkelanjutan yang melibatkan setiap elemen dalam perekonomian; (2) mempromosikan

kesadaran diri, penelitian dan pendidikan di bidang sampah plastik di laut; (3) memperkuat kerja sama di bidang reformasi kebijakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang tepat dalam menangani masalah sampah plastik di laut; (4) mengimplementasikan kebijakan berkaitan sampah plastik di laut, dan; (5) memperkuat kerja sama internasional dan regional melalui EAS, dan organisasi kemitraan EAS lainnya. Sehingga dengan adanya deklarasi pemimpin EAS ini sangat memberikan Indonesia ruang-ruang kerja sama dan keuntungan diplomatik. Alasannya adalah karena pertemuan EAS yang membahas masalah sampah plastik di laut adalah inisiatif di Indonesia di tahun 2016, di masa sidang EAS ke-11. Hal ini menunjukkan keberhasilan Indonesia untuk melakukan *agenda-setting* pada forum-forum di kawasan. Hal ini penting, karena deklarasi EAS inilah yang juga dijadikan dasar bagi Indonesia dalam menambah mitra kerja sama di bidang penanganan sampah plastik di laut di tingkat ASEAN seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Proses Pelibatan Pemangku Kepentingan Lain

Dalam pelibatan sektor privat, Indonesia sedang melakukan usaha lobi dengan empat kelompok korporasi yang melakukan pengemasan dengan menggunakan plastik yang paling masif, bahkan terdaftar dalam daftar dari perusahaan penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia, yaitu grup *Danone*, grup *Unilever*, grup *Mayora*, dan grup *Indofood* yang sama-sama di undang dalam *multi-stakeholder meeting* yang diadakan oleh Bank Dunia pada 30 Oktober 2018. Peranan dari sektor privat dalam melakukan perubahan dari pengemasan, dan peningkatan kualitas hubungan antara sektor privat dengan pemerintah merupakan salah satu hal penting yang diupayakan pemerintah dalam rencana aksi nasional. Dengan adanya dukungan dari pemerintah nasional dan berbagai aktor di tingkat regional dan internasional, maka diharapkan keempat aktor

ini mau untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan rencana aksi nasional.

Pertama, PT. Danone Indonesia, merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar, tidak hanya di Indonesia, namun secara global, Danone menempati lima besar penyumbang sampah plastik sebagai sebuah kelompok perusahaan. Namun, Danone Indonesia mengatakan bahwa sebagai sebuah perusahaan, Danone memiliki sektor CSR yakni PRAISE yang bertanggung jawab terhadap proses pendaur-ulangan sampah plastik yang di diproduksi oleh Danone. PRAISE sendiri merupakan program kolaborasi dari Coca-Cola, Indofood, Netsle, Tetrapack, Daone dan Unilever. Proses dimulai dari mengintervensi *value-chain* dari proses yang ada. Danone berasumsi bahwa saat ini telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam mengurangi sampah plastik di laut. Namun, hal ini memang masih belum cukup dalam menangani semua masalah yang disebabkan oleh kemasan dari produk Danone. Namun hal ini menunjukkan pula sebuah inisiatif yang bisa dirangkul oleh pemerintah Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional. Lebih lanjut, Wakil Presiden Danone Indonesia, yang juga memimpin proses CSR dari Danone Indonesia mengatakan bahwa saat ini, pemerintah Indonesia tidak hanya harus membuat regulasi semata, namun juga harus secara aktif melibatkan sektor swasta, dan menginkorporasikan program-program yang ada sebagai penguatan dari Rencana Aksi Nasional yang ada.

Danone Indonesia, pada Juni 2018 telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dengan ikut serta dalam memajukan pendidikan yang berkaitan dengan penanaman nilai dari penggunaan plastik seminimum mungkin. Selain itu, Danone Indonesia, terutama Aqua sebagai produk yang paling banyak menyumbang sampah plastik berusaha untuk menimalisir sampah yang dihasilkan dengan melakukan desain ulang dari produk Aqua, yang pada tahun 2025 tidak akan habis

pakai. Target ini juga merupakan sebuah penyesuaian sebagai cara bagi Danone Indonesia dalam menunjukkan komitmen dalam kolaborasi dari Danone dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, Danone juga berusaha meningkatkan sistem pengumpulan sampah plastik yang di produksi oleh Danone yang nantinya akan masuk ke dalam proses daur ulang yang dikelola oleh PRAISE.

Serta *kedua*, PT. Mayora Indah, Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. Keduanya merupakan perusahaan yang sepenuhnya milik Indonesia, dengan kantor utama yang berada di Indonesia. Kedua perusahaan ini juga, sayangnya merupakan perusahaan asli Indonesia yang paling banyak menyumbang sampah plastik, tidak hanya di laut Indonesia, namun sampai ke pesisir Asia Timur, Amerika Latin dan Afrika. Tidak seperti halnya Danone dan Unilever, yang memang berkontribusi terhadap sampah plastik di berbagai negara karena mereka memiliki pabrik di negara tersebut, Mayora dan Indofood menyebarkan sampah di laut berbagai negara, dalam jumlah yang masif sekalipun mereka tidak memiliki basis manufaktur di negara tersebut. Dengan adanya fakta ini, yang dikemukakan oleh BFFP pada Oktober 2018 di dalam pertemuan antar NGO dalam *Our Ocean Conference 2018*, diharapkan pemerintah Indonesia mulai melakukan pendekatan-pendekatan pada perusahaan yang ada untuk melakukan penanganan sampah plastik di laut Indonesia. Karena hanya dengan kolaborasi antara sektor publik dan privat, penanganan sampah plastik yang inklusif dapat diselenggarakan. Ditambah lagi, dampak diplomatik yang didapatkan juga akan lebih masif, karena akan melibatkan berbagai jaringan transnasional yang ikut serta dalam proses implementasi Rencana Aksi Nasional.

Proses Pembentukan Gagasan pada Level Internasional

Proses pembentukan gagasan mengenai Rencana Aksi Nasional sebagai sebuah

momentum diplomatik dimulai dari level nasional, dengan adanya kolaborasi aktor-aktor internal yang ada, yakni kementerian/ lembaga terkait yang bersama-sama ikut serta dalam proses perencanaan Rencana Aksi Nasional. Dalam proses pembentukan gagasan di level nasional ada dua faktor utama yang menentukan. *Pertama*, adalah konsistensi pejabat negara dalam menyuarakan narasi mengenai diplomasi maritim dan juga penanganan sampah plastik di laut. Dalam faktor pertama ini, dengan kemunculan pertama Rencana Aksi Nasional kemuka publik di tahun 2017, selama kurun waktu 2017-2018, pejabat negara yang berkaitan dengan masalah sampah plastik, dan juga Presiden Joko Widodo terus menyuarakan narasi mengenai bagaimana Indonesia akan menjadi negara yang memimpin dalam penanganan sampah plastik di laut. Pidato Joko Widodo dalam *2017 G20 Leaders' Retreat* di Hamburg, Jerman dan Deputi 1 Kemenko Maritim, Duta Besar Arief Havaz Oegroseno di OOC 2017 Malta merupakan pemantik dari penguatan narasi dalam setiap pidato dan pernyataan para pejabat negara terkait. *Kedua* adalah adanya pergerakan yang masif di dalam negeri. Dengan semangatnya Indonesia dalam penguatan sektor laut, dimulai dengan narasi Poros Maritim Global di tahun 2014, inisiasi kembali IORA di tahun 2016, IAF di tahun 2017, hingga OOC di tahun 2018, Indonesia semakin mantap dalam memastikan bahwa setiap elemen dalam internal pemerintahan Indonesia mampu untuk menangani setiap tantangan yang Indonesia ambil dalam menjadi *pioneer* dalam penanganan sampah plastik melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut Indonesia.

Narasi yang ada juga didorong aktor eksternal yang ikut serta memperkuat narasi bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang memimpin penanganan sampah plastik di laut. Kepercayaan Bank Dunia, Denmark dan Norwegia sebagai negara donor. Serta kepercayaan Vietnam dan Thailand untuk dipimpin Indonesia dalam penanganan sampah

plastik di laut memberikan Indonesia sebuah kepercayaan diri untuk masuk pada arena perbincangan tingkat tinggi di level kawasan dan internasional. Setelah adanya dukungan aktor eksternal, maka narasi yang ada dinaikkan level pembicaraannya dalam pertemuan pemimpin di tingkat regional dan internasional. Munculnya deklarasi pemimpin EAS dalam penanganan sampah plastik di laut dan juga *Working Group* untuk masalah penanganan sampah plastik di laut adalah hasil dari kuatnya narasi yang dibawa Indonesia dalam penanganan sampah plastik di tingkat ASEAN. Sehingga, saat ini Rencana Aksi Nasional merupakan salah satu gagasan dalam level internasional di mana Indonesia merupakan motor penggerak utama. Paparan dari proses pembentukan gagasan di level internasional ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mempertahankan momentum diplomatik dari diplomasi maritimnya melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025.

Pembentukan gagasan ini tidak lepas dari pemanfaatan publisitas dari rencana aksi nasional yang diperkuat dengan kuatnya narasi tenggat waktu, dan metafora pergerakan yang digunakan oleh setiap pejabat negara pada setiap kesempatan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penekanan pada 70% pengurangan sampah plastik di laut Indonesia merupakan bahasa diplomatik yang kuat yang memberikan Indonesia banyak publisitas. Setiap proses dan langkah-langkah dalam peningkatan eskalasi pembicaraan dan pembentukan gagasan di level internasional tidak akan bisa terjadi tanpa adanya pemanfaatan yang cermat dari publisitas Rencana Aksi Nasional.

KESIMPULAN

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025 merupakan sebuah instrumen diplomasi maritim Indonesia yang baru saja diluncurkan tahun 2018. Namun Rencana Aksi Nasional bukanlah hanya sekedar instrumen diplomasi maritim semata,

namun sebuah momentum diplomatik dari diplomasi maritim Indonesia yang berbasiskan UNCLOS. Indonesia merupakan negara maritim yang saat ini menghadapi masalah sampah plastik di laut. Gelar sebagai penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia memberikan Indonesia berbagai tekanan yang berasal dari negara-negara sahabat, organisasi internasional juga organisasi non-pemerintahan lainnya. Terdapat tiga simpulan utama yang dikemukakan dalam artikel ini.

Pertama, Indonesia saat ini telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mendukung proses penanganan sampah plastik yang ada di laut Indonesia yang telah menjadi perhatian publik internasional beberapa tahun ke belakang. Namun, Indonesia masih belum mampu untuk mengimplementasikan produk hukum yang dimiliki, sehingga proses klasifikasi sampah yang dibuang ke laut masih belum dilakukan oleh Indonesia. Upaya untuk melakukan pengontrolan sendiri baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2018 dengan adanya kerjasama yang terjalin melalui *Indonesia-Oceans Multi-Donor Trust Fund*.

Kedua, diplomasi maritim Indonesia yang dilakukan berdasarkan dengan UNCLOS sendiri saat ini dilakukan dengan melakukan penegasan kedaulatan Indonesia di lautan berdasarkan rezim laut tersebut. Upaya tersebut termasuk dilakukannya formalisasi zona laut Indonesia, penegasan jalur perlintasan internasional, serta upaya pembaruan peta zona laut NKRI yang telah dilakukan Indonesia pada tahun 2018 yang menunjukkan bentuk keseriusan Indonesia dalam memperkuat posisi laut Indonesia di level internasional. Menjadikan infrastruktur laut yang kuat sebagai salah satu alat diplomasi maritim Indonesia.

Serta *ketiga*, dalam melaksanakan diplomasi maritimnya, Rencana Aksi Nasional menjadi sebuah sarana dalam mencapai momentum diplomatik dalam diplomasi maritim melalui penanganan sampah plastik di laut. Mempertontonkan ketaatan dan upaya

mandiri tanpa terikat rezim sampah di laut sebagai bentuk komitmen di level internasional. Dengan adanya dukungan dari pihak internal pemerintahan Indonesia yang mendengarkan gagasan yang ada di level internasional dan dengan dukungan dari berbagai aktor eksternal, Indonesia sejauh ini telah berhasil dalam mempertahankan momentum diplomatik yang dimiliki untuk melancarkan setiap gerakan diplomasi maritim pada target-target sasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN (2017). Declaration of the Decade of Coastal and Marine Environmental Protection in the South China Sea (2017-2027). *ASEAN Treaties Collection*. Dipetik 8 September 2018 dari <http://asean.org/storage/2017/11/Declaration-for-a-Decade-of-Coastal-and-Marine-Environmental-Protection-in-the-South-China-Sea-2017-2027.pdf>.
- ASEAN (2017, Desember 8). Media Release: ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region. *ASEAN Secretariat*. Dipetik 8 September 2018 dari <https://environment.asean.org/media-release-asean-conference-on-reducing-marine-debris-in-asean-region/>
- Berridge, G.R. (2010) *Diplomacy: Theory and Practices (4th Edition)*. New York: Palgrave Mcmillan.
- Gaworecki, M. (2017, April 6). Indonesia to Spearhead UN Campaign to Rid Oceans of Waste. *The Coral Triangle*. Dipetik 21 Desember 2018 dari <http://thecoraltriangle.com/stories/indonesia-to-spearhead-un-campaign-to-rid-oceans-of-waste>.
- IMO (2017, Desember 1) IMO Assembly elects new 40-Member Council. *IMO Briefing*. Dipetik 7 September 2018 dari <http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/35-Council-Elections-A30.aspx>
- IMO (2018, Agustus 6) Status of Conventions—Ratifications by States. *International Maritime Organizations*. Dipetik 7 September 2018 dari <http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx>

- Kemenko Maritim (2018). *Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia*. Jakarta: Kemenko Maritim.
- Kemlu RI (2017, Mei 12). RI Tegaskan Komitmen *Blue Economy* di IORA. Press Release Kementerian Luar Negeri RI. Dipetik 10 September 2018 dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/RI-Tegaskan-Komitmen-Laksanakan-Blue-Economy-di-IOra.aspx>.
- Kemlu RI (2018, Oktober 30). Indonesia Invites East Asia Summit Countries to Overcome Plastic Waste. *Kementerian Luar Negeri RI*. Dipetik 21 Desember 2018 dari <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Invites-East-Asia-Summit-Countries-to-Overcome-Plastic-Waste.aspx>.
- Langenheim, J. (2017, Maret 2). Indonesia pledges \$1bn a year to curb ocean waste. *The Guardian*. Dipetik 21 Desember 2018 dari <https://www.theguardian.com/environment/the-coral-triangle/2017/mar/02/indonesia-pledges-us1-billion-a-year-to-curb-ocean-waste>.
- Leung, H. (2018, April 21). Five Asian Countries Dump More Plastic Into Oceans Than Anyone Else Combined: How You Can Help. *The Forbes Magazine*. Dipetik 21 Desember 2018 dari <https://www.forbes.com/sites/hannahleung/2018/04/21/five-asian-countries-dump-more-plastic-than-anyone-else-combined-how-you-can-help/#1aa6499d1234>.
- Norway Embassy (2018, Feb 1). Norway and Indonesia are fighting marine debris together. *Release Page of Norwegian Embassy in Indonesia*. Dipetik 20 Desember 2018 dari <https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/norway-and-indonesia-are-fighting-marine-debris-together/>
- Norway Embassy (2018, November 8). Norway increasing funding for global efforts to combat marine litter. *Release Page of Norway Embassy in Indonesia*. Dipetik 21 Desember 2018 dari <https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/norway-increasing-funding-for-global-efforts-to-combat-marine-litter/>
- Our Ocean (2018) Our Ocean Conference: on Marine Pollution. *Our Ocean Conference Bali 2018*. Dipetik 12 September 2018 dari <http://ourocean2018.org/?l=areas-of-action&#pollution>.
- UN (1982) United Nations Convention on the Law of the Sea. *UN Treaties Collection*.
- UNEP. (2017, Feb 23). Indonesia joins UN in a bid to eradicate ocean plastic. *UNEP*. Dipetik 22 Desember 2018 dari <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/indonesia-joins-un-bid-eradicate-ocean-plastic>.
- United Nations (2018) Indonesia Against Marine Plastic Debris. *Commitments Page of Our Ocean Conference*. Dipetik 8 September 2018 dari <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=14387>.
- The Guardian*. Dipetik 21 Desember 2018 dari <https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur>
- Williams, C. (1996). Combatting marine pollution from land-based activities: Australian initiatives. *Ocean & coastal management*, 33(1-3), 87-112.
- World Bank, Kemenko Maritim, Royal Danish Embassy Indonesia (2017). *Indonesia Marine Debris Hotspots Rapid Assessment*. Jakarta: Kemenko Maritim

BIOGRAFI

Cecep Hermawan merupakan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Tertarik mengkaji tentang diplomasi maritim Indonesia, khususnya dalam isu lingkungan hidup.

Hasan Sidik adalah pengajar pada program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran yang mendalami kajian mengenai Hukum Internasional dalam hubungan internasional.

ⁱ United Nations Environment Programme, sebuah organisasi di bawah PBB yang memiliki fungsi utama sebagai kordinator segala kegiatan berkaitan dengan isu lingkungan yang diselenggarakan PBB di negara-negara anggotanya.

ⁱⁱ Korespondensi Diplomatik terkait dukungan negara-negara sahabat terhadap Indonesia dalam IMO terlampir.